

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur

- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Anggara, Sahya, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Setia, Bandung, 2018.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2024*, BPS Kabupaten Banyumas, Banyumas, 2024.
- Fauzan, Muhammad, *Hukum Pemerintah Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, STAIN Press, Purwokerto 2010.
- Hadie, Agus Nur, *Rekonstruksi Regulasi Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang Berbasis Nilai Keadilan*, *Disertasi*, Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Kusmaryono, Ismono, *Rekayasa Jalan Raya 1 Perencanaan Geometrik Jalan*.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Mustanir, Ahmad Et Al. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Widina Media Utama, Bandung, 2023.
- Pamuji, Kadar, Et Al. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, UNSOED Press, Purwokerto, 2023.
- Pemerintah Kabupaten Banyumas, *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025*, Pemkab Banyumas, Banyumas, 2024.
- Pudyatmoko, Sri, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Yogyakarta, 2009.

- Rahayu, Amy, Y.S Et Al. *Pelayanan Publik dan E-Government: Sebuah Teori dan Konsep*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2022.
- Rahadjo, Satjipto, *Membelah Hukum Progresif*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2006.
- Rahmadana, Muhammad Fitri, *Pelayanan Publik*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020.
- Rauf, Rahyunir, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuannya)*, NusaMedia, Yogyakarta, 2018.
- Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Risdiyanto, *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi*, PT Leutika Nouvalitera, Yogyakarta, 2014.
- Saodang, Hamirhan, *Konstruksi Jalan Raya Buku 1 Geometrik Jalan*, Nova, Bandung, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Madmuji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Solihkin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, 2021.
- Sutapa, I Ketut Et Al. *Paradigma Ergonomi Dalam Penerapan Pengelolaan Parkir*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Wasistiono, Sadu, *Perkembangan Pemikiran Mengenai Urusan Pemerintahan Umum*, Mipi, Jakarta, 2014.
- Wiratno, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2019.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1102).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372)

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 50).

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 99).

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Parkir (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 69).

Keputusan Bupati Nomor 551/236/Tahun 2023 tentang Zona Parkir Dalam Ruang Milik Jalan di Kabupaten Banyumas.

C. Jurnal Ilmiah

Abikusna, R. Agus, Kewenang Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, SOSFILKOM, Vol. 13 No. 1, 2019.

Agustina, Enny, Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat, Jurnal Literasi Hukum, Vol. 3 No. 2, 2019.

Batara, Andri dan Prinaldi, Aldri, Analisis Pandangan Hukum Administrasi Tentang Peran Pejabat Publik, Strukturisasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, Vol. 6 No. 1, 2024.

Bihuku, Salmon, Urusan Pemerintahan Konkuren Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lex Administratum, Vol. 6 No. 1, 2018.

Dewi, Riska Chyntia, Suparno, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Jurnal Media Administrasi, Vol. 7 No. 1, 2022.

Erlianti, Dila, Kualitas pelayanan publik. Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis, Vol. 1 No. 1, 2019.

Hadi, I Gusti Ayu Apsari, Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Kertha Partika, Vol. 39 No. 1, 2017.

Kuntadi, Cris dan Zakaria, Muhammad Irvan, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran: Sumber Daya Manusia, Penghargaan dan Sanksi, Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol. 1 No. 3, 2022.

Machmud, Syachrul, Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 7 No. 2, 2017.

Martira, Amelia, Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50 No. 1, 2020.

Raharja, Ivan Fauzani, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, 2014.

Sutisna, Nadia Wirdha dan Effane, Anne, Fungsi Manajemen Sarana dan Prasarana, Karimah Tauhid, Vol. 1 No. 2, 2022.

Wijayanti, Septi Nur, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 2, 2016.

D. Media Online

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 20 Februari 2024, Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (unit) 2023, <https://jateng.bps.go.id/id/statisticstable/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjmW==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kendaraan-di-provinsi-jawa-tengah--unit---2023.html?year=2023>,

Tribun Banyumas, 20 Juni 2025, Ironi Banyumas Berjuluk Kota Sejuta Parkir: Hasil Tak Disetor ke Pemkab, Tarif Hingga Rp. 5.000, <https://banyumas.tribunnews.com/2025/06/20/ironi-banyumas-berjuluk-kota-sejuta-parkir-hasil-tak-disetor-ke-pemkab-tarif-hingga-rp5000>,

Universitas Islam Sunan Agung (UNISSULA), 29 Agustus 2024, Sekda Banyumas Raih Gelar Doktor Hukum di Unissula, <https://unissula.ac.id/sekda-banyumas-raih-gelar-doktor-hukum-di-unissula/>,

Radar Banyumas, 15 Mei 2024, Delapan Juru Parkir di Sokaraja Diberi Pembinaan, <https://radarbanyumas.disway.id/read/105491/delapan-juru-parkir-di-sokaraja-diberi-pembinaan>.